



Persepsi Pengusaha Umkm Tentang Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Profitabilitas (Studi Kualitatif Di Kabupaten Tangerang)

Muhamad Rijal Safei^{1*}, Wardokhi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan D4, Universitas Pamulang

Email: muhammadizzal490@gmail.com,

Article History: Received on 11 April 2026, Revised on 02 June 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) owners regarding the impact of tax policies on business profitability in Tangerang Regency. MSME tax policies are expected to encourage tax compliance while improving business performance; however, in practice, these policies are perceived differently by MSME owners. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected MSME owners, supported by observation and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with triangulation applied to ensure data validity. The results indicate that some MSME owners perceive tax policies as a burden that may reduce business profitability, mainly due to limited understanding and administrative capabilities related to taxation. Conversely, other MSME owners view tax policies as government support through relatively low tax rates and simplified reporting procedures, which help maintain business sustainability. These findings suggest that differences in perceptions are influenced by the level of tax literacy and business experience of MSME owners. This study concludes that MSME tax policies need to be accompanied by enhanced tax socialization and assistance in order to optimally contribute to business profitability and sustainability

Keywords: Perception, Tax Policy, MSMEs, Profitability..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap profitabilitas usaha di Kabupaten Tangerang. Kebijakan perpajakan UMKM diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan kinerja usaha; namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut dipersepsikan secara berbeda oleh para pemilik UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM yang dipilih secara purposive, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pemilik UMKM memandang kebijakan perpajakan sebagai beban yang dapat mengurangi profitabilitas usaha, terutama karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan administratif terkait perpajakan. Sebaliknya, sebagian pemilik UMKM lainnya memandang kebijakan perpajakan sebagai bentuk dukungan pemerintah melalui tarif pajak yang relatif rendah dan prosedur pelaporan yang lebih sederhana, sehingga membantu mempertahankan keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan dan pengalaman usaha pemilik UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan UMKM perlu disertai dengan peningkatan sosialisasi dan pendampingan perpajakan agar dapat secara optimal berkontribusi terhadap profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten Tangerang, UMKM menjadi sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait kebijakan perpajakan yang dinilai kompleks dan berpotensi membebani usaha.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman pengusaha terhadap peraturan perpajakan, yang berdampak pada tingkat kepatuhan serta persepsi negatif terhadap pajak. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan bisnis, termasuk dalam hal pengembangan usaha dan pencapaian profitabilitas. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung UMKM, namun efektivitasnya masih bergantung pada pemahaman dan persepsi pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Tangerang terhadap kebijakan pajak serta dampaknya terhadap profitabilitas usaha. Variabel yang dikaji meliputi persepsi terhadap kebijakan pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kebijakan perpajakan dan profitabilitas UMKM, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung perkembangan UMKM.

Penelitian ini terletak pada fokusnya untuk meneliti persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten Tangerang terhadap dampak kebijakan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan profitabilitas usaha.

Mengacu pada penelitian Al Farisi & Iqbal Fasa (2022), kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga penelitian ini berperan penting dalam konteks tersebut.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemungutan tertentu. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan perpajakan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meringankan beban pelaku usaha. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan akses informasi, serta persepsi negatif bahwa pajak merupakan beban tambahan bagi usaha.

Persepsi wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan perpajakan. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, pengalaman usaha, karakteristik sektor usaha, akses informasi, kemampuan teknologi, serta kualitas pelayanan otoritas pajak. Persepsi yang positif cenderung meningkatkan kepatuhan, sedangkan persepsi negatif dapat mendorong penghindaran pajak.

Di sisi lain, profitabilitas UMKM merupakan indikator utama dalam menilai kinerja usaha, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya operasional, efisiensi manajemen, akses permodalan, serta kebijakan perpajakan. Kebijakan pajak yang tidak sesuai dengan karakteristik UMKM berpotensi menurunkan profitabilitas, sedangkan kebijakan yang adaptif dan memberikan insentif dapat mendukung peningkatan kinerja usaha.

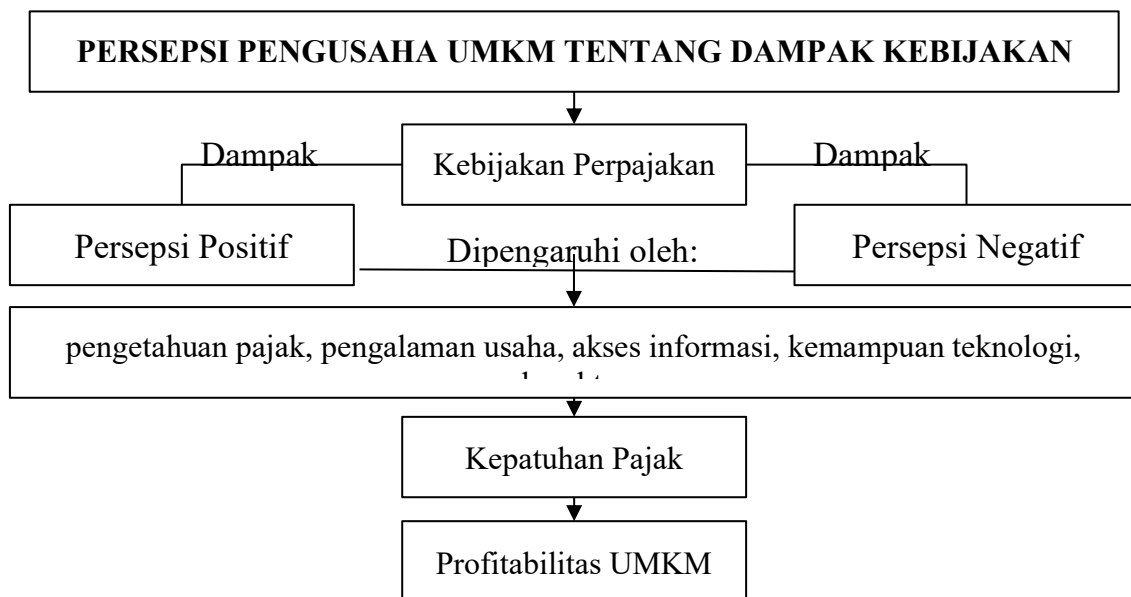
Dengan demikian, hubungan antara kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan profitabilitas UMKM menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif, khususnya dalam memahami bagaimana pelaku UMKM merespons kebijakan pajak dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan perpajakan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku dan kinerja UMKM. Kebijakan tersebut, baik dalam bentuk tarif, insentif, maupun sistem administrasi, akan diinterpretasikan oleh pelaku UMKM melalui persepsi mereka terhadap keadilan, kemudahan, dan manfaat kebijakan tersebut.

Persepsi pengusaha UMKM terhadap kebijakan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, pengalaman usaha, akses informasi, kemampuan dalam menggunakan teknologi perpajakan, serta kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Faktor-faktor ini membentuk penilaian apakah kebijakan pajak dianggap mendukung atau justru membebani usaha.

Persepsi yang positif akan mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menciptakan pengelolaan usaha yang lebih baik, efisiensi biaya, serta stabilitas keuangan. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UMKM. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menurunkan kepatuhan, meningkatkan beban usaha, dan berdampak pada penurunan profitabilitas.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif untuk memahami secara mendalam persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kebijakan perpajakan serta dampaknya terhadap profitabilitas usaha. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjektif informan dalam konteks sosial dan ekonomi yang nyata.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang memiliki karakteristik UMKM yang beragam dan representatif. Waktu penelitian berlangsung pada Maret hingga Juni 2025,



meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, serta analisis dan penyusunan laporan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument), yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu persepsi terhadap kebijakan pajak, dampaknya terhadap profitabilitas, tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal dua tahun. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan variasi jenis usaha dan pengalaman perpajakan. Jumlah informan berkisar antara 13 hingga 20 orang, dengan penentuan berdasarkan prinsip saturation (kejenuhan data).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability, dengan teknik triangulasi, member check, dan audit trail. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan relevan dalam menjelaskan persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan serta implikasinya terhadap profitabilitas usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki persepsi yang relatif positif terhadap kebijakan perpajakan, khususnya terkait penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan karena tarif yang rendah dan mekanisme perhitungan yang sederhana berbasis omzet.

Selain itu, pelaku UMKM menilai bahwa kebijakan pajak telah mencerminkan asas keadilan fiskal, karena terdapat perbedaan perlakuan antara usaha kecil dan usaha besar. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa persepsi negatif, antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan pajak yang masih belum merata
2. Perubahan regulasi yang sering terjadi dan membingungkan
3. Keterbatasan pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan digital
4. Kurangnya pendampingan langsung dari pemerintah

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, pengalaman, dan akses terhadap informasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa interpretasi individu terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor kognitif dan pengalaman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pesat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2022, jumlah pelaku UMKM mencapai 61.011 unit usaha, yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan karakteristik pengelolaan yang masih sederhana.

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur serta masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha. Meskipun mayoritas telah memiliki NPWP, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih bervariasi, khususnya terkait penerapan pajak final sebesar 0,5% dari omzet.

Penelitian ini melibatkan 13 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling



dengan mempertimbangkan variasi sektor usaha seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah tangga. Jumlah responden ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, di mana informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Kode Responden	Jenis Usaha	Lama Usaha	Jumlah Karyawan	Status NPWP
R1	pedagang ikan	5 tahun	2 orang	ada
R2	toko kelontong	5 Tahun	2 orang	ada
R3	pedagang sayuran	4 Tahun	3 orang	ada
R4	Barber shop	7 Tahun	2 orang	ada
R5	pedagang pakaian	3 Tahun	1 orang	ada
R6	peternak ayam merah petelur	4 Tahun	1 orang	ada
R7	bengkel sperpart motor	5 Tahun	2 orang	ada
R8	usaha konveksi jahit	4 Tahun	5 orang	ada
R9	pedagang Ayam geprek	2 Tahun	3 orang	ada
R10	distributor telur bebek	4 Tahun	2 orang	ada
R11	agen pakan ternak	4 Tahun	3 orang	ada
R12	warung nasi padang	3 Tahun	2 orang	ada
R13	pedagang bakso	3 Tahun	2 orang	ada

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2. Ringkasan Persepsi pengusaha UMKM di Kabupaten tangerang terhadap kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah

Tema Utama	Responden	Interpretasi/Analisis
Kebijakan pajak dianggap membantu karena tarif ringan.	R1,R10,R11	responden menilai bahwa tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet cukup meringankan beban usaha kecil dan menengah
Kebijakan pajak membedakan usaha kecil dan besar.	R2	Pengusaha menilai pemerintah telah menunjukkan keadilan fiskal karena memperlakukan pelaku usaha sesuai skala usahanya. Hal ini menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan
Sosialisasi kebijakan pemerintah masih belum efektif.	R3	Responden merasa masih kurang memperoleh informasi dan pendampingan teknis mengenai tata cara pelaporan maupun pembayaran pajak secara daring (DJP Online).
Kesenjangan antara niat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk membantu UMKM	R4,R6	Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah dinilai masih perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar kebijakan berjalan efektif.
Kemudahan kebijakan pajak bagi UMKM melalui sistem pajak berbasis omzet	R5	Kebijakan pajak dinilai membantu karena sederhana dan hanya berdasarkan omzet
Perubahan aturan pajak yang sering terjadi membingungkan	R7	Ketidakstabilan aturan pajak yang menyulitkan pelaku UMKM kecil



Tema Utama	Responden	Interpretasi/Analisis
pelaku UMKM kecil		
Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan langsung dalam memahami kebijakan pajak.	R8, R12	Kurangnya pendampingan langsung sebagai kendala dalam memahami kebijakan pajak
Pemerintah dinilai sudah berusaha membuat kebijakan yang ramah terhadap UMKM.	R9	Apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam mendukung UMKM melalui kebijakan
Kebijakan pajak saat ini dirasakan lebih baik dan cukup membantu dibanding sebelumnya.	R13	Dampak Kebijakan Pajak terhadap Usaha Kecil

Sumber: Data Primer Diolah 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pengusaha UMKM terhadap dampak kebijakan pajak terhadap profitabilitas usaha di Kabupaten Tangerang, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

Pertama, persepsi pengusaha UMKM terhadap kebijakan perpajakan cenderung beragam. Sebagian pelaku usaha memandang kebijakan pajak sebagai beban, terutama akibat keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur administrasi perpajakan. Namun demikian, sebagian lainnya menilai kebijakan tersebut cukup membantu, khususnya karena adanya tarif pajak final yang relatif rendah serta sistem perhitungan yang sederhana berbasis omzet. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat literasi pajak dan pengalaman wajib pajak.

Kedua, kebijakan perpajakan tidak secara langsung mempengaruhi profitabilitas UMKM, tetapi memiliki dampak tidak langsung melalui kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman dan kesiapan administrasi yang baik cenderung mampu menjaga stabilitas profitabilitas usahanya. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dan kemampuan administratif menyebabkan pajak dipersepsikan sebagai faktor yang berpotensi menekan keuntungan usaha.

Ketiga, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, antara lain keterbatasan pengetahuan perpajakan, rendahnya kemampuan administrasi keuangan, serta kesulitan dalam mengikuti perkembangan regulasi dan penggunaan sistem digital perpajakan. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku UMKM menerapkan berbagai strategi adaptif, seperti mencari informasi secara mandiri, mengikuti sosialisasi, serta melakukan pencatatan keuangan sederhana. Strategi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kepatuhan, meskipun masih memerlukan dukungan eksternal yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih merata dan berkelanjutan, baik melalui pendekatan langsung maupun pemanfaatan media digital. Selain itu, penyediaan layanan pendampingan seperti klinik pajak UMKM serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan serta mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih tertib, meskipun dalam bentuk sederhana. Pemanfaatan teknologi perpajakan juga perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan agar memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara kebijakan pajak dan profitabilitas UMKM. Kajian lanjutan mengenai peran digitalisasi perpajakan juga menjadi topik yang relevan untuk dikembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S. & Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan JEJAK*, 62, 1-9.
- Astuti, S., Alem, R., & Rahman, J. A. (2024). Faktor Internal Dan Eksternal Pelaku Umkm Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Kabupaten Bantul, Yogyakarta) Internal And External Factors Of Sme Factors Affecting Tax Compliance (Case Study On Msme Actors In Bantul Regency, Yogyakarta). 12(3).
- Darmawati, D. & Oktaviani, A. A. 2018. Pengaruh Penerapan Akuntansi,UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 919–925.
- Djabbar, I., & Baso, S. (2019). Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Firman, M. A., Siregar, S.V., Martani, D., & Rahayu, N. 2020. Analysis of Book-Tax Conformity, Tax Avoidance, and Earning Persistence. *Psychology and Education*, 579, 109-118.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 606–632.
- Hakim, F. 2013. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 346, 787–795.
- Hutabarat, Yunita.N.F,Putri.R.G , Indrayani(2022). Pengaruh Modal Usaha, Penggunaan Informasi Akuntansi Dan Sistem Penjualan E-commerce Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh Volume 1, No,1 Juli 2022 DOI*:
- Indrawan, R. & Binekas, B. 2018. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 63, 419–428. 182 *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 10, No. 2 (Oktober 2022)*
- Khaerunnisa, I. & Wiranto, A. 2015. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12, 211–224.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. 29, 210–225.
- Kolaka Utara. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2),
- Kurniawati, P. E., Nugroho, P. I. & Arifin, C. 2012. Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 102, 1-10.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Ningrum, R. F. (2016). Tinjauan atas sosialisasi perpajakan dan peran account representative dalam kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Batu Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–14.
- Ningsih, Cahaya N.D. 2011. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).
- Ningtiyas, J. D. A. 2017. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar



- Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah SAK-EMKM Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 21, 11–17.
- Prasetyo, P. E. 2008. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21, 1–13.
- Pujianto, Indryani Dwi. 2014. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektivitas Self Assessment system dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Palopo. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Rachmawati, A., & Dewi, T. (2022). Analisis persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(3), 211–222.
- Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Yogyakarta: Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN).
- Reschiwati, R., Sayekti, F. & Arief, F. 2019. Account Representative Roles, E- Filling and MSMEs in Tax Compliance. *Bussecon Review of Finance & Banking*, 12, 15–24.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi ke-5. Jakarta, Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational Behavior* (17th ed.). New York: Pearson Education.
- Robbins, Stephen, p. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sa'diyah, I. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak Tax Evasion. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Safrina, N., Soehartono, A. & Noor, A. B. S. 2018. Studi Literatur: Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018*, 373–391.
- Santoso, Singgih. 2004. *Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Seagate, 2012. *Uang Pajak Untuk Siapa?*.
- Setiawan, Maria Justina. 2008. Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 4 No.2. FISIP-UNPAR
- Siahaan, Pahala, M. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi 1. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Siregar, Syopian. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif: Dilengkapi perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.



- Sunarto. 2003. Perpajakan 1. Yogyakarta: UD Adipura.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta . Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage SCA 8, 23, 1–7
- Witono, B. 2016. Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 72, 196–208.
- Creswell, J. W. (2014). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.